

Determinan Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara

Gaby Dainty Juliet Roring^{1*}, Pradipta M. Parasan², Patricia S. Mawitjere³, Adventinus K. Lambut⁴

^{1,2,3} Universitas Negeri Manado, Jl. Kampus Unima Tonsaru Kec. Tondano Selatan, Minahasa 95618, Indonesia

¹gabydjroring@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 September 2023

Direvisi: 18 November 2023

Disetujui: 28 Desember 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

Kata Kunci:

Bank Perkreditan Rakyat

Dana Pihak Ketiga

Non-Performing Loan

Penyaluran Kredit

ABSTRAK

Peranan Perbankan sebagai lembaga intermediasi sangat krusial sebagai penunjang bergeraknya roda perekonomian dan pembangunan nasional, mengingat fungsinya sebagai penyelenggara transaksi pembayaran, perantara antara debitur dan kreditur, dan lain-lain. Penyaluran kredit merupakan fokus dan kegiatan utama perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena gap dimana belum optimalnya kredit yang disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara. Dengan demikian, perlu dilakukan pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit, beberapa diantaranya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit Bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan *Non-Performing Loan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan agar pihak Bank Perkreditan Rakyat dapat lebih meningkatkan Dana Pihak Ketiga dan meminimalisir terjadinya *Non-Performing Loan* dalam rangka peningkatan penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara.

ABSTRACT

Keywords:

Credit Distribution

Non-Performing Loan

Rural Banks

Third Party Fund

The role of banking as an intermediation institution is very important in supporting the running of the economy and national development, considering its function as an organizer of payment transactions, an intermediary between debtors and creditors, and so on. The main focus and activity of banking in carrying out its intermediation function is credit distribution. This research is motivated by the existence of a gap phenomenon where the credit distributed by Rural Banks in North Sulawesi is not yet optimal. Thus, it is necessary to examine the factors that influence credit distribution, some of which are Third Party Fund (TPF) and Non-Performing Loan (NPL). The aim of this research is to find out the influence of Third Party Fund and Non-Performing Loan on credit distribution at Rural Banks in North Sulawesi. The analysis technique used in this research is multiple linear regression with the Ordinary Least Square (OLS) method. The results show that Third Party Fund and Non-Performing Loan have a positive and significant effect on credit distribution. Based on the results, it is hoped that Rural Banks can further increase Third Party Fund and minimize the occurrence of Non-Performing Loan in order to increase credit distribution at Rural Banks in North Sulawesi.

©2024, Gaby D. J. Roring, Pradipta M. Parasan, Patricia S. Mawitjere, Adventinus K. Lambut

This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Sebagai lembaga intermediasi, bank memegang peranan yang krusial dalam perekonomian. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi atau sebagai perantara antara debitur dan kreditur, penyelenggara transaksi pembayaran, dan lain-lain merupakan penunjang bergeraknya roda perekonomian dan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Penyaluran kredit merupakan fokus dan merupakan kegiatan utama perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Pasal 1, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk *overdraft*, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari pengaruh industri perbankan. Dalam kondisi yang wajar, perbankan dapat menjadi indikator yang tepat untuk mengukur pertumbuhan sektor riil suatu daerah (Pasha, 2009). Selain itu, pertumbuhan aktif dan kontribusi nyata sektor perbankan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bisnis perbankan dapat memburuk bersamaan dengan ekonomi nasional, demikian pula sebaliknya, ketika ekonomi stagnan, sektor perbankan juga terkena dampaknya, menyebabkan operasi intermediasi terganggu (Pratama, 2010). Pembangunan ekonomi adalah bagian dari pembangunan nasional sebuah negara; perkembangan dan peran lembaga keuangan seperti perbankan sangat penting untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi. Perbankan berkontribusi dengan memberikan kredit kepada sektor-sektor yang membutuhkan dana; dengan kata lain, perbankan turut menggerakkan roda perekonomian negara.

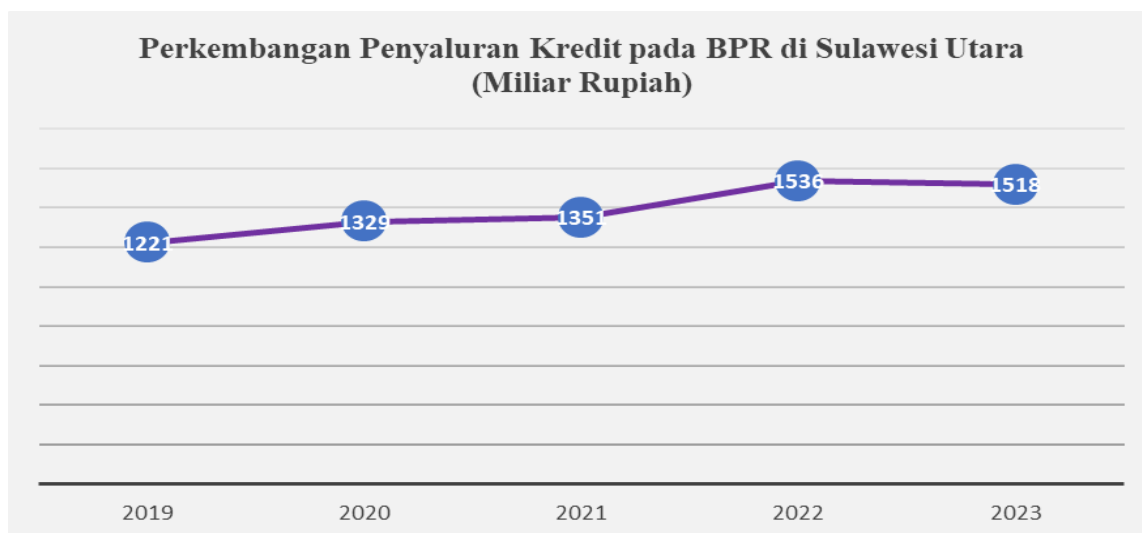
Salah satu cara kredit mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengatur pemberian kredit sesuai dengan prioritas pembangunan ekonomi, yang memungkinkan pemerataan hasil pembangunan. Pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi setidaknya berdampak pada dua hal: kredit perbankan memiliki kemampuan untuk meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat melalui kredit konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan kredit perbankan juga berkontribusi pada peningkatan pembiayaan investasi dan modal unit usaha, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas dan produktivitas perekonomian.

Lembaga keuangan bank yang tepat dan strategis dalam memberikan pelayanan khususnya di bidang perkreditan adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat memiliki tujuan yang sama dengan bank pada umumnya, yaitu beroperasi sebagai intermediasi atau perantara keuangan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan mendorong usaha di masyarakat.

Salah satu alasan rendahnya daya beli dan lambatnya perputaran roda perekonomian masyarakat kabupaten dibandingkan daerah kota adalah karena sedikitnya UMKM dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah berupaya membangun Bank Perkreditan Rakyat di daerah kabupaten agar masyarakat yang ingin membuka usaha bisa mendapatkan fasilitas keuangan yang dapat membantu kegiatan perekonomian. Dalam praktiknya, kegiatan Bank Perkreditan Rakyat memang tidak sebanyak

kegiatan yang dilakukan oleh bank umum, karena pada dasarnya dibuat sebagai lembaga keuangan mikro. Oleh sebab itu, Bank Perkreditan Rakyat juga dikenal sebagai bank yang melayani dan memenuhi kebutuhan pengusaha mikro, kecil, hingga menengah yang lokasinya dekat dengan jangkauan. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat dalam perekonomian nasional dan daerah sangat penting dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat melalui penghimpunan dan penyaluran dana terutama dalam pengembangan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari publikasi Statistik Perbankan Indonesia, besarnya jumlah penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Perkembangan Penyaluran Kredit pada BPR di Sulawesi Utara

Tampak bahwa selang 5 tahun terakhir perkembangan penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya penyaluran kredit pada tahun 2019 sebesar 1.221 miliar rupiah menjadi 1.518 miliar rupiah pada tahun 2023. Jika dilihat dengan seksama, peningkatan pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada tahun 2022 dimana jumlah penyaluran kredit meningkat menjadi 1.536 miliar rupiah, dan kemudian turun pada tahun selanjutnya 2023 menjadi 1.518 miliar rupiah.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit diantaranya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non-Performing Loan* (NPL). Salah satu sumber dana yang diperoleh bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Hasanudin dan Prihatiningsih, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank adalah dana yang dihimpun dari masyarakat yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Apabila Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank meningkat maka penyaluran kredit di masyarakat akan meningkat (Rahmayanti, 2024). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan bank dan sumber dana penting bagi pembiayaan kegiatan operasional bank.

Dalam melakukan penyaluran kredit, pihak perbankan akan menghadapi resiko tidak lancarnya pembayaran dari masyarakat. Ketidاكلancaran pembayaran ini biasa disebut kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya (Kuncoro dan Suhardjono, 2011). Menurut Pinto, Bagiada

dan Parameswara (2020) terjadinya *Non-Performing Loan* ini akan memperburuk kondisi kesehatan bank sekaligus menyebabkan ketidakmampuan bank dalam menyalurkan kreditnya.



Gambar 2. Perkembangan DPK dan NPL pada BPR di Sulawesi Utara

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non-Performing Loan* (NPL) pada BPR di Sulawesi Utara selang waktu tahun 2019 sampai 2023 cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) selang waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sekitar 27%, dari 1.331 miliar rupiah menjadi 1.699 miliar rupiah. Perkembangan *Non-Performing Loan* (NPL) selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sekitar 13%, dari 94 miliar rupiah pada tahun 2019 dan mencapai 107 miliar rupiah pada tahun 2023.

Perbankan memainkan peran kunci dalam menunjang perekonomian daerah dan nasional. Melalui penyaluran kredit, perbankan membantu meningkatkan investasi yang kemudian memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi. Perbankan membantu membiayai usaha-usaha kecil dan menengah, yang merupakan sumber daya ekonomi penting bagi Indonesia. Perbankan juga membantu masyarakat melalui kredit konsumsi yang pada akhirnya akan membantu menggerakkan roda perekonomian. Studi menunjukkan bahwa penyaluran kredit oleh lembaga perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Untuk meningkatkan kegiatan produksi, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat memberikan dananya kepada pihak yang mengalami kekurangan dana. Kegiatan produksi ini akan meningkatkan perekonomian negara.

Melihat pentingnya peranan kredit yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, maka perlu untuk meneliti faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Apabila terdapat masalah dalam penyaluran kredit, kegiatan-kegiatan perekonomian akan terkena imbasnya, dan kemudian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, penelitian ini akan menguji beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran kredit, diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non-Performing Loan* (NPL). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non-Performing Loan* (NPL) secara parsial dan simultan terhadap penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara.

Kebaruan dari penelitian ini adalah tahun penelitian yang terkini dan juga subjek serta lokasi penelitian yang belum diteliti pada lima tahun terakhir. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk pihak perbankan, pemerintah dan juga masyarakat.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Diduga Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh terhadap penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara.
- 2) Diduga *Non-Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh terhadap penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara.
- 3) Diduga Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non-Performing Loan* (NPL) secara simultan memiliki pengaruh terhadap penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data numerik atau angka-angka. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melakukan investigasi secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data-data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika dan komputasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan melalui publikasi Statistik Perbankan Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan penyaluran Kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non-Performing Loan* (NPL) pada Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara selang waktu 2019 sampai 2023.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Data diolah dengan menggunakan *Microsoft Excel 2019* dan *Eviews 12*. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Penyaluran Kredit

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi Variabel Bebas

X1 = Dana Pihak Ketiga (DPK)

X2 = *Non-Performing Loan* (NPL)

e = Error

Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian asumsi klasik dan pengujian statistik. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar memastikan model regresi yang diperoleh merupakan model terbaik dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias, serta konsisten. Uji Asumsi Klasik yang dilakukan yaitu Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi dan Uji Multikolinearitas. Pengujian Statistik yang dilakukan adalah Uji-t, Uji-F dan Uji Koefisien Determinasi R^2 .

Uji Normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan adalah Uji Jarque-Bera. Apabila nilai probabilitas melebihi nilai α 0.05, maka data dikatakan berdistribusi normal. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ada beberapa uji yang bisa digunakan salah satunya dengan melihat nilai *Chi-Square* dari *Obs*R-Squared*. Apabila nilai probabilitas *Chi-Square* dari *Obs*R-Squared* melebihi nilai α 0.05,

maka data terbebas dari masalah heteroskedastitas. Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu tes yang bisa digunakan adalah pengujian *Lagrange Multiplier* (LM test) atau sering disebut juga *Breusch-Godfrey* (BG test). Apabila nilai probabilitas *Chi-Square* dari $Obs \cdot R\text{-Squared}$ melebihi nilai α 0.05, maka data terbebas dari masalah autokorelasi. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Apabila nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) < 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi.

Uji-t bertujuan untuk menunjukkan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji-F bertujuan untuk melihat secara simultan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji Koefisien Determinasi R^2 bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dianjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 karena memperhitungkan jumlah variabel bebas dalam model regresi dan mempertimbangkan apakah variabel tersebut signifikan dalam menjelaskan variabel terikat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Berikut ini merupakan hasil uji asumsi klasik dan uji regresi yang telah dilakukan di penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji
Uji Normalitas	Prob. JB 0.909661
Uji Autokorelasi	Prob. <i>Chi-Square</i> 0.2734
Uji Heteroskedastisitas	Prob. <i>Chi-Square</i> 0.1179
Uji Multikolinearitas	VIF DPK 1.787973, VIF NPL 1.787973

Berdasarkan tabel hasil uji asumsi klasik di atas, menunjukkan bahwa dalam model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat masalah asumsi klasik. Hal itu terlihat dari nilai Prob. Jarque-Bera 0.909661 lebih besar dari nilai α 0.05, nilai Prob. *Chi-Square* 0.2734 dan 0.1179 lebih besar dari nilai α 0.05, serta nilai VIF lebih kecil dari 10. Maka disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini lolos pengujian asumsi klasik.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	83.72180	47.59780	1.758943	0.0840
DPK	0.686511	0.039912	17.20065	0.0000
NPL	2.312127	0.496064	4.660944	0.0000
<i>R-squared</i>	0.930075			
<i>Adjusted R-squared</i>	0.927621			
<i>F-statistic</i>	379.0783			
Prob (<i>F-statistic</i>)	0.000000			

Berdasarkan tabel diatas, hasil persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$PK = \alpha + \beta_1 DPK + \beta_2 NPL + e$$

Dimana:

$$PK = 83.72180 + 0.686511DPK + 2.312127NPL + e$$

Dari hasil persamaan regresi yang diperoleh di atas dapat dipahami bahwa:

- 1) Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara DPK dengan Penyaluran Kredit. Hal tersebut dilihat dari nilai Prob. DPK lebih kecil dari nilai α 0.05. Artinya, DPK berpengaruh terhadap penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.
- 2) Nilai koefisien yang diperoleh 0.686511 menyatakan setiap kenaikan DPK sebesar 1% mengakibatkan penyaluran Kredit mengalami kenaikan sebesar 0.68%, *ceteris paribus*.
- 3) Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara NPL dengan Penyaluran Kredit. Hal tersebut dilihat dari nilai Prob. NPL lebih kecil dari nilai α 0.05. Artinya, NPL berpengaruh terhadap penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.
- 4) Nilai koefisien yang diperoleh 2.3122127 menyatakan setiap kenaikan NPL sebesar 1% mengakibatkan penyaluran Kredit mengalami kenaikan sebesar 2.31%, *ceteris paribus*.
- 5) Secara simultan, terlihat bahwa Prob (F-statistic) lebih kecil dari nilai α 0.05, yang berarti DPK dan NPL secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.
- 6) Berdasarkan hasil penelitian, variabel DPK dan NPL mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel penyaluran Kredit sebesar 92.76% dan sisanya 7.24% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

3.2. Pembahasan

Penyaluran kredit adalah salah satu kegiatan perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga intermediasi. Kredit perbankan memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, karena kredit perbankan dapat membantu meningkatkan permintaan konsumen, mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, serta menjaga stabilitas ekonomi.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu lembaga perbankan yang ikut membantu masyarakat melalui penyaluran kreditnya lebih memiliki sasaran melayani kebutuhan masyarakat menengah ke bawah atau pengusaha kecil yang umumnya belum dapat terjangkau oleh bank umum. Berdasarkan data yang diperoleh dari publikasi Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan bulan Januari tahun 2024, jumlah Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara sebanyak 63, dengan rincian 15 KP, 29 KC dan 19 KPK. Penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara selang 5 tahun terakhir (2019-2023) mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya penyaluran kredit pada tahun 2019 sebesar 1.221 miliar rupiah menjadi 1.518 miliar rupiah pada tahun 2023.

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan salah satu sumber dana untuk kegiatan penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara juga mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2023. Hal itu ditunjukkan dari jumlah DPK pada tahun 2019 sebesar 1.331 miliar rupiah menjadi 1.699 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal

ini berarti masyarakat Sulawesi Utara masih mempercayakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan uang.

Seiring dengan peningkatan penyaluran Kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara, peningkatan juga dialami oleh *Non-Performing Loan* (NPL). Pada tahun 2019, NPL berjumlah 94 miliar rupiah yang kemudian naik menjadi 107 miliar rupiah pada tahun 2023. Meskipun kenaikan NPL terlihat tidak terlalu tinggi, namun rasio NPL pada tahun 2023 berjumlah 7,04%, melebihi 5% ambang batas yang ditentukan. Hal tersebut tentu menunjukkan kinerja perbankan yang belum maksimal dalam mengawasi dan menangani kredit yang disalurkan serta tentunya terjadi penurunan profitabilitas.

Pada penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Rahmayanti (2024) dalam jurnal *INNOVATIVE* berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Terhadap Penyaluran Kredit (Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bogor Periode 2018-2022)” dimana hasil yang diperoleh Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Bogor periode 2018-2022. Penelitian ini juga menghasilkan hal yang sejalan dengan teori dimana semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun, maka kemampuan bank dalam menyalurkan kredit juga akan semakin besar (Gayo, Prihatni dan Armeliza. 2022).

Hasil *Non-Performing Loan* (NPL) pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pinto, Bagiada dan Parameswara (2020) yang berjudul “Pengaruh DPK, NPL dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Mandiri Periode Tahun 2014-2018” dalam jurnal *Warmadewa Economic Development Journal*, dimana NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aghani dkk (2022) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, dimana hasil yang diperoleh NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.

Non-Performing Loan (NPL) merupakan salah satu indikator kesehatan Bank dengan ambang batas yang ditentukan adalah sebesar 5%. Bank yang dalam kegiatan menyalurkan kreditnya tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian kemungkinan akan berpotensi menimbulkan atau meningkatkan *Non-Performing Loan* (NPL). Sebelum menyalurkan kredit, pihak Bank akan melakukan survey dan analisis terhadap calon nasabah untuk melihat kemampuan dalam membayar atau mengembalikan dana tersebut. Tidak bisa dipungkiri, hal yang sering terjadi adalah meskipun nasabah sudah dikategorikan lolos untuk mendapatkan kredit, terkadang nasabah masih bermasalah untuk melunasi kredit atau mengembalikan dana yang dipinjam tersebut pada waktu mendatang.

Pengaruh signifikan dan hubungan yang positif antara *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap penyaluran kredit yang dihasilkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *Non-Performing Loan* (NPL) maka semakin tinggi pula penyaluran kredit, dan sebaliknya. Artinya, meskipun *Non-Performing Loan* (NPL) suatu bank sedang mengalami peningkatan atau sedang berada di posisi tinggi, bank akan tetap menyalurkan dananya dalam bentuk kredit, karena salah satu sumber pendapatan atau keuntungan dari bank adalah melalui penyaluran kredit.

4. Kesimpulan

Secara parsial, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non-Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan yang positif dengan penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara. Secara simultan, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non-Performing Loan* (NPL) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara.

Dengan melihat pengaruh yang signifikan tersebut, sangat diperlukan usaha dan juga kebijakan yang bisa meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menurunkan *Non-Performing Loan* (NPL). Dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tinggi, maka akan meningkatkan penyaluran kredit yang bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Begitu juga dengan *Non-Performing Loan* (NPL) yang rendah atau dibawah ambang batas yang ditentukan, mencerminkan kesehatan dari perbankan serta akan meningkatkan kinerja perbankan yang juga membawa dampak baik bagi perekonomian. Oleh karena itu, pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sulawesi Utara dianjurkan untuk dapat lebih giat lagi dalam melakukan usaha dan membuat kebijakan yang bisa meningkatkan kepercayaan juga keinginan masyarakat untuk dapat menyimpan uang di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sehingga dana yang terkumpul tersebut bisa disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang kian meningkat.

Daftar Pustaka

- Aghani, J. R., Fidyah, F., Pradita, A. E., Permanasari, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Media Bina Ilmiah*, 16(12), 7929-7940.
- Gayo, A. A., Prihatni, R., Armeliza, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 10(1), 25-38.
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. BPFE.
- Pasha, R. (2009). Analisis Penawaran dan Permintaan Kredit serta Identifikasi Peluang Ekspansi Pembiayaan Kredit Sektoral di Wilayah Kerja KBI Malang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(1), 148-164.
- Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 (2005).
- Pinto, N. G. D. C. G., Bagiada, K., & Parameswara, A. A. G. (2020). Pengaruh DPK, NPL dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Mandiri Periode Tahun 2014 – 2018. *Warmadewa Economic Development Journal*, 3(2), 73-79.
- Pratama, B. A. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia 2005-2009)*. [Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang].
- Rahmayanti, I. D. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Penyaluran Kredit (Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bogor Periode 2018-2022). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 10678-10692.
- Undang-Undang, R. I. (1998). Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*.